

# PENGARUH PERKEMBANGAN SUBKATEGORI PENYEDIAAN AKOMODASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI INDONESIA

**Yulandha Rizkova**  
**Topowijono**  
**M. Djayusman**  
Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya  
Malang  
*E-mail: yulandharizkova@gmail.com*

## **ABSTRACT**

*In 2011, subcategories accommodation activity accounted for Indonesia's GDP amounted to 214 022 billion, and continued to increase up to 258 161 billion in 2014. This phenomenon proves that subcategory accommodation activity has the potential to increase economic growth in Indonesia. This research uses explanatory quantitative method. The sample of this research were 32 provinces in Indonesia with observation period of 2010 until 2014. The results from this research showed that the number of accommodation establishments and/or room occupancy rate has partial effect and positive significant effect to GDP in 32 provinces in Indonesia simultaneously. An increasing number of accommodation establishment and occupancy rates partially and simultaneously will increase the GDP.*

**Key Word:** *Accommodation activity, number of accommodation, rate room, and Local GDP*

## **ABSTRAK**

Pada tahun 2011 subkategori penyediaan akomodasi menyumbang PDB Indonesia sebesar 214.022 miliar rupiah, dan terus meningkat hingga mencapai 258.161 miliar rupiah pada tahun 2014. Fenomena ini membuktikan bahwa subkategori penyediaan akomodasi memiliki potensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 32 provinsi yang berada di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan positif secara bersama-sama antara jumlah usaha akomodasi dan/atau tingkat hunian kamar usaha akomodasi terhadap PDRB ADHK subkategori penyediaan akomodasi di 32 provinsi di Indonesia. Peningkatan jumlah usaha akomodasi dan tingkat hunian kamar usaha akomodasi secara parsial maupun bersama-sama akan meningkatkan PDRB ADHK subkategori penyediaan akomodasi.

**Kata Kunci:** *Penyediaan akomodasi, jumlah akomodasi, tingkat hunian kamar dan PDRB*

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi merupakan faktor utama dalam menilai kemakmuran sebuah negara. Perkembangan ekonomi di suatu negara dapat diukur dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu (Badan Pusat Statistik, 2015). PDB (Produk Domestik Bruto) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara atau sebagai cerminan keberhasilan suatu pemerintahan dalam menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang dimiliki.

Sektor pariwisata memiliki peran dalam menunjang pembangunan di suatu negara yaitu sebagai sumber devisa dan pendapatan bagi daerah, serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat (Soebagyo, 2012). Salah satu sektor pariwisata yang diakui sebagai kategori ekonomi dalam data publikasi PDB maupun PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) oleh BPS (Badan Pusat Statistik) di Indonesia adalah subkategori Penyediaan Akomodasi. Pada tahun 2011, subkategori penyediaan akomodasi menyumbang PDB Indonesia sebesar 214.022 miliar rupiah, dan terus meningkat hingga mencapai 258.161 miliar rupiah pada tahun 2014. Fenomena ini membuktikan bahwa subkategori penyediaan akomodasi memiliki potensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Sulastiyono (2008:269) menuliskan bahwa usaha hotel yang berhasil dapat dilihat dari tingkat hunian kamarnya. Penelitian yang dilakukan oleh Arafani (2011) menyebutkan bahwa variabel jumlah akomodasi hotel dan jumlah tamu yang menginap berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB di Kota Batu. Penelitian ini menjadikan jumlah usaha akomodasi dan tingkat hunian kamar baik hotel bintang maupun non bintang serta usaha akomodasi lainnya sebagai variabel yang memengaruhi perkembangan subkategori penyediaan akomodasi yang nantinya memengaruhi besarnya PDRB setiap provinsi di Indonesia.

Pembangunan di bidang kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Waluyo, 1993:30). Salah satu usaha di bidang pariwisata yang memiliki perkembangan dan pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia adalah usaha akomodasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian dengan judul **“Pengaruh Perkembangan Subkategori Penyediaan Akomodasi terhadap Pertumbuhan**

**Ekonomi Daerah di Indonesia”** dipandang perlu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi subkategori penyediaan akomodasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia khususnya PDRB.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Otonomi Daerah

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus dan mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam hal memberi pelayanan, peningkatan peran serta, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing dengan menggunakan sumber daya ekonomi yang dimiliki.

### Pertumbuhan Ekonomi

#### a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan berarti kenaikan pendapatan nasional nyata dalam jangka waktu tertentu. Tarigan (2002:210) mengungkapkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengertian sebagai proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi suatu negara dimana pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi tolak ukur pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta menentukan strategi pembangunan ekonomi untuk tahun-tahun berikutnya. PDRB dapat ditingkatkan dengan melibatkan berbagai faktor produksi (sumber-sumber ekonomi) dalam setiap kegiatan ekonominya (Suparmoko, 2002:100).

#### b. Ciri-Ciri Pertumbuhan Ekonomi

Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi yang diungkapkan oleh Simon Kuznets dalam Jhingan (2003:57) antara lain:

1. Laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita,
2. Peningkatan produktivitas,
3. Laju perubahan struktural yang tinggi,
4. Urbanisasi (perpindahan penduduk dari desa ke kota),
5. Ekspansi negara maju,
6. Arus barang, modal, dan orang antar bangsa.

## Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

### a. Pengertian PDRB

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan nilai barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh unit ekonomi di suatu daerah (Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, 2014). PDRB merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yang memuat berbagai instrumen yang dapat menggambarkan keadaan makro ekonomi suatu daerah. PDRB menggambarkan balas jasa bagi unit ekonomi, yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut.

### b. Kegunaan Data PDRB

Data PDRB adalah salah satu dari statistik pendapatan regional yang selalu dipublikasikan kepada umum oleh BPS setiap tahun. Badan Pusat Statistik (2013) mengungkapkan bahwa manfaat yang dapat diperoleh dari data PDRB antara lain yaitu:

1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
2. Tingkat Kemakmuran Suatu Daerah
3. Tingkat Inflasi dan Deflasi
4. Gambaran Struktur Perekonomian.

### c. Perhitungan PDRB Suatu Daerah

Badan Pusat Statistik (2015) menjelaskan bahwa perhitungan PDRB secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan.

### d. PDRB berdasarkan Pendekatan Produksi

Badan Pusat Statistik (2015) menjelaskan bahwa kategori ekonomi dalam penyusunan PDRB menurut lapangan usaha pendekatan produksi mencakup tujuh belas lapangan usaha dan kategori kesembilan adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

## Subkategori Penyediaan Akomodasi

### a. Pengertian Usaha Akomodasi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa penyediaan akomodasi merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

### b. Klasifikasi Hotel

Klasifikasi hotel adalah suatu sistem pengelompokan hotel-hotel ke dalam berbagai kelas atau tingkatan, berdasarkan penilaian tertentu. Indonesia menggunakan sistem bintang dalam mengklasifikasikan sebuah hotel. Sistem bintang yang digunakan adalah mulai dari hotel

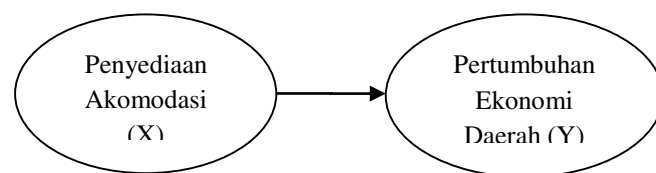
non bintang, hotel bintang satu hingga hotel bintang lima.

## Hubungan Subkategori Penyediaan Akomodasi dengan PDRB

Pada saat ini perkembangan bisnis akomodasi di Indonesia semakin berkembang. Hampir di semua kota di Indonesia dibangun akomodasi dari mulai hotel berbintang, non bintang, hingga usaha akomodasi lainnya. Nirwandar (2014) menyebutkan bahwa jenis pengeluaran paling banyak dari seorang wisatawan mancanegara pada tahun 2012 dan 2013 adalah untuk biaya akomodasi yaitu sebesar 48,9% dari total keseluruhan pengeluaran. Oleh karena itu, akomodasi menjadi salah satu pendorong utama dalam meningkatkan pertumbuhan pariwisata di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa usaha akomodasi memiliki dampak langsung terhadap peningkatan PDRB di daerah tersebut.

## Kerangka Konseptual

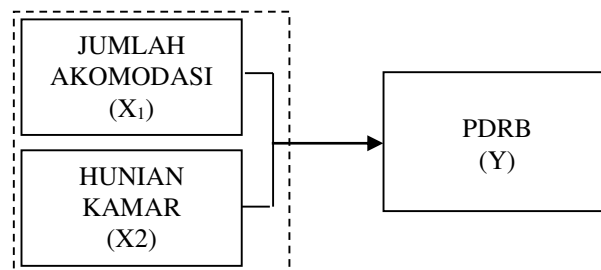
Kerangka konseptual pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Variabel independen dalam penelitian ini adalah subkategori penyediaan akomodasi yang terdiri dari jumlah akomodasi ( $X_1$ ) dan tingkat hunian kamar usaha akomodasi ( $X_2$ ). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang dilihat dari PDRB ( $Y$ ).

## Hipotesis Penelitian



Gambar 2. Model Hipotesis

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah kuantitatif eksplanatori. Penelitian dilakukan di Indonesia. Sampel berjumlah 32 provinsi di Indonesia selama tahun 2010 sampai 2014. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi data PDRB.

Teknik analisis dilakukan dengan statistik deskriptif, asumsi klasik, regresi linier berganda, dan koefisien determinasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Deskriptif

Angka minimum jumlah akomodasi di Indonesia adalah 62 unit yaitu di Provinsi Papua Barat pada tahun 2010. Angka maksimum jumlah akomodasi di Indonesia adalah 2.050 unit yaitu di Provinsi Bali pada tahun 2014. Rata-rata jumlah usaha akomodasi di Indonesia pada tahun 2010-2014 sebesar 496,74 unit. Nilai standar deviasi sebesar 509,268 unit. Jumlah usaha akomodasi di 32 provinsi di Indonesia menunjukkan perbedaan variasi ketimpangan yang besar.

Tingkat hunian kamar usaha akomodasi tahun 2010-2014 di 32 provinsi di Indonesia yang paling kecil sebesar 27% di Provinsi Maluku pada tahun 2010 dan tingkat hunian kamar usaha akomodasi paling besar senilai 62% di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014. Rata-rata tingkat hunian kamar usaha akomodasi sebesar 42,80% setiap tahun. Nilai standar deviasi sebesar 6,86%. Tingkat hunian kamar di 32 provinsi di Indonesia menunjukkan perbedaan variasi ketimpangan yang kecil.

PDRB ADHK subkategori penyediaan akomodasi tahun 2010-2014 di 32 provinsi di Indonesia yang paling kecil senilai 23 miliar rupiah di Provinsi Bengkulu pada tahun 2010 dan PDRB ADHK subkategori penyediaan akomodasi paling besar senilai 13.572 miliar rupiah di Provinsi Bali pada tahun 2014. Rata-rata PDRB ADHK subkategori penyediaan akomodasi sebesar 1.394,27 miliar rupiah setiap tahun. Nilai standar deviasi sebesar 2.669,496 miliar rupiah. Nilai PDRB subkategori penyediaan akomodasi di 32 provinsi di Indonesia menunjukkan perbedaan variasi ketimpangan yang besar.

### 2. Pengaruh Jumlah Akomodasi dan Tingkat Hunian Kamar terhadap PDRB secara Bersama-sama

Tabel 1. Ringkasan Hasil Uji F

Variabel Terikat	F <sub>hitung</sub>	Sig.	Hasil
Variabel Bebas: Jumlah Akomodasi dan Tingkat Hunian Kamar			
PDRB ADHK Subkategori Penyediaan Akomodasi	201,017	0,000	H <sub>a</sub> diterima

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2015.

Diketahui jumlah akomodasi dan tingkat hunian kamar memiliki F<sub>hitung</sub> sebesar 201,017 dengan signifikansi 0,000. Berdasarkan hal

tersebut, H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima karena F<sub>hitung</sub> > F<sub>tabel</sub> (201,017 > 3,05) atau signifikansi F < 0,05 (0,00 < 0,05), sehingga terdapat pengaruh positif antara jumlah akomodasi dan tingkat hunian kamar secara bersama-sama terhadap PDRB subkategori penyediaan akomodasi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Arafani (2011). Arafani (2011) menyatakan bahwa variabel jumlah akomodasi hotel dan jumlah tamu yang menginap berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB di Kota Batu.

Semakin tinggi jumlah akomodasi hotel dan jumlah tamu yang menginap maka semakin tinggi pula PDRB di suatu daerah. Sama halnya dengan hasil pada penelitian ini yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif secara signifikan antara jumlah usaha akomodasi dan tingkat hunian kamar usaha akomodasi terhadap PDRB subkategori penyediaan akomodasi. Jumlah usaha akomodasi dan tingkat hunian kamar usaha akomodasi merupakan faktor pendorong untuk meningkatkan PDRB subkategori penyediaan akomodasi karena usaha akomodasi memberikan nilai tambah bagi daerah mulai dari pendapatan masyarakat (upah, gaji, sewa tanah, dan keuntungan), hingga pajak.

### 3. Pengaruh Jumlah Akomodasi dan Tingkat Hunian Kamar terhadap PDRB secara Parsial

Tabel 2. Ringkasan Hasil Uji t

No.	Variabel Bebas	t <sub>hitung</sub>	Sig.	Hasil
Variabel Terikat: PDRB ADHK Subkategori Penyediaan Akomodasi				
1	Jumlah Akomodasi	18,250	0,000	H <sub>a</sub> diterima
2	Tingkat Hunian Kamar	5,304	0,000	H <sub>a</sub> diterima

#### a. Pengaruh Jumlah Akomodasi terhadap PDRB

Jumlah akomodasi memiliki t<sub>hitung</sub> sebesar 18,250 dengan signifikansi 0,000. Berdasarkan hal tersebut H<sub>a</sub> diterima karena t<sub>hitung</sub> > t<sub>tabel</sub>, (18,250 > 1,982) atau signifikansi t < 0,05 (0,000 < 0,05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah usaha akomodasi terhadap PDRB ADHK subkategori penyediaan akomodasi. Temuan tersebut mengindikasikan kemungkinan terjadinya peningkatan terhadap PDRB yang berasal dari subkategori penyediaan akomodasi dengan cara meningkatkan jumlah usaha akomodasi pada suatu daerah. Jumlah usaha akomodasi memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin banyak jumlah usaha akomodasi

maka semakin banyak pula pendapatan daerah tersebut dari sektor akomodasi.

### **b. Pengaruh Tingkat Hunian Kamar terhadap PDRB**

Tingkat hunian kamar usaha akomodasi memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 5,304 dengan signifikansi 0,000. Berdasarkan hal tersebut maka  $H_a$  diterima karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , ( $5,304 > 1,98$ ) atau signifikansi  $t < 0,05$  ( $0,00 < 0,05$ ), maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara tingkat hunian kamar usaha akomodasi terhadap PDRB ADHK subkategori penyediaan akomodasi. Hal tersebut berarti bahwa perubahan tingkat hunian kamar menjadi salah satu faktor penentu yang dapat menjelaskan perubahan PDRB ADHK subkategori penyediaan akomodasi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Qadarochochman (2010) yang menyatakan bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh secara parsial signifikan terhadap penerimaan daerah. Sugiarto (2002:10) mengungkapkan bahwa tingkat hunian kamar adalah tolok ukur keberhasilan sebuah hotel. Tingkat hunian kamar di suatu daerah dipengaruhi oleh potensi usaha akomodasi di daerah tersebut. Tingkat hunian kamar usaha akomodasi di suatu provinsi juga dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat dan wisatawan provinsi tersebut. Usaha akomodasi tidak bisa dipisahkan dari usaha pariwisata lainnya karena saling berkaitan. Semakin berpotensi usaha pariwisata di suatu provinsi, maka tingkat hunian kamar semakin meningkat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan positif secara bersama-sama antara jumlah usaha akomodasi dan/atau tingkat hunian kamar usaha akomodasi terhadap PDRB ADHK subkategori penyediaan akomodasi di 32 provinsi di Indonesia. Jumlah usaha akomodasi dan tingkat hunian kamar usaha akomodasi merupakan faktor penentu dan pendorong dalam menyusun PDRB ADHK subkategori penyediaan akomodasi. Peningkatan jumlah usaha akomodasi dan tingkat hunian kamar usaha akomodasi secara parsial maupun bersama-sama akan meningkatkan PDRB ADHK subkategori penyediaan akomodasi. Begitu juga sebaliknya, apabila jumlah usaha akomodasi maupun tingkat hunian kamar usaha akomodasi mengalami penurunan maka PDRB ADHK subkategori penyediaan akomodasi juga mengalami penurunan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah didapatkan, maka dapat dibuat saran sebagai berikut:

1. Pemerintah provinsi di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan jumlah usaha akomodasi. Perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk sektor penyediaan akomodasi di suatu daerah. Peningkatan jumlah usaha akomodasi dapat dicapai melalui peningkatan investasi untuk menambah jumlah akomodasi yang ada. Beberapa cara untuk menarik minat investor adalah dengan mempromosikan potensi usaha akomodasi, dan mempermudah peraturan terkait perijinan dan pendirian usaha akomodasi.
2. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan tingkat hunian kamar usaha akomodasi. Tingkat hunian kamar usaha akomodasi dapat ditingkatkan dengan memperhatikan pengembangan potensi daerah di sektor penyediaan akomodasi, seperti melalui peningkatan potensi wisata yang dimiliki. Peningkatan potensi wisata dapat dilakukan melalui pengadaan event-event yang menarik banyak wisatawan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang wisata. Semakin banyak jumlah wisatawan di suatu daerah maka akan menambah kemungkinan untuk meningkatkan tingkat hunian kamar usaha akomodasi. Selain itu, faktor yang dapat mempengaruhi tingkat hunian kamar adalah kualitas usaha akomodasi itu sendiri. Sebaiknya pengusaha jasa akomodasi harus memperhatikan kualitas usahanya mulai dari produk, pelayanan hingga faktor manajemen. salah satu usaha yang bisa dilakukan oleh pengusaha jasa akomodasi adalah melakukan sertifikasi, baik sertifikasi usaha maupun sertifikasi profesi bagi karyawan yang bekerja di bidang akomodasi.
3. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang penting dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel lain terkait usaha akomodasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arafani, Fariza. 2011. Pengaruh Kegiatan Pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) Kota Batu. *www.lib.uin-malang.ac.id*.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Produk Domestik Bruto 2013*, diakses pada 1 Maret dari <http://bps.go.id/>.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2011-2015*, diakses pada 3 Maret dari <http://bps.go.id/>.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2010-2014*, diakses pada 3 Maret dari <http://bps.go.id/>.
- Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. 2014. *Metadata Produk Domestik Regional Bruto*, diakses pada 10 Maret dari <http://www.bi.go.id/id/statistik/metadat a/sekda/Documents/8PDRBSEKDA1.pdf>.
- Jhingan, ML. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Dialih bahasakan oleh D. Guritno. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nirwandar, Sapta. 2014. *Building WOW Indonesia Tourism and Creative Industry*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Qadarochman, Nasrul. 2010. Analisis Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata di Kota Semarang dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang*.
- Soebagyo. 2012. Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia. *Jurnal Liquidity*, 1 (2), hal: 153-158.
- Sugiarto. 2002. *Psikologi Pelayanan dalam Industri Jasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sulastiyono, Agus. 2008. *Manajemen Penyelenggaraan Hotel*. Cetakaan keenam. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan, Robinson. 2002. *Perencanaan Pembangunan Wilayah: Pendekatan Ekonomi dan Ruang*. Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi. DIRJEN DIKTI.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, diakses pada 19 Februari dari <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/PANSUS-Undang-Undang-Nomor-23-Tahun-2014-tentang-Pemerintahan-Daerah-1421294802.pdf>.
- Waluyo, Harry dkk. 1993. *Dukungan Budaya Terhadap Perkembangan Ekonomi* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.